

Sejarah Perkembangan Ilmu Politik¹

Apakah ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan dan apakah ilmu politik sudah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan? Pertanyaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, apakah yang disebut ilmu pengetahuan itu? Umumnya dan terutama pada ilmu-ilmu eksakta dianggap bahwa ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman). Menemukan hukum-hukum ilmiah inilah yang merupakan tujuan dari penelitian ilmiah. Kalau definisi ilmu sosial mengikuti definisi ilmu-ilmu eksakta maka hampir seluruh ilmu sosial belum memenuhi syarat untuk menjadi ilmu pengetahuan, oleh karena itu sarjana ilmu sosial pada mulanya cenderung untuk mengemukakan definisi yang lebih umum sifatnya, seperti terlihat pada pertemuan-pertemuan sarjana-sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah "seluruh pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok-pokok tertentu". Definisi serupa pernah dikemukakan oleh ahli dari Belanda yang mengatakan: "ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis". Apabila perumusan-perumusan ini dipakai sebagai patokan maka selaslah bahwa ilmu politik boleh dikatakan atau dinamakan ilmu pengetahuan.

Kajian Ilmu Politik didasari oleh Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Hukum dan Filsafat. Berkembang pesat pada tahun 1950.

Pendekatan Ilmu Politik dan Kajiannya berkembang melalui tiga tahap:

I. Pendekatan Tradisional:

- Sangat Ideologis, normatif dan legalistik dimana pendekatan ini melihat yang terbaik, seperti seseorang yang menjadi Presiden adalah Ulama.
- Fakta dan sistem nilai yg dianut masyarakat tdk dpt dipisahkan. Misalnya: sebuah kekuasaan bisa jatuh karena nilai yang berkembang di masyarakat memang sudah memahaminya kejatuhannya.
- Common sense dianggap ilmiah dimana fungsi teori adalah untuk meramalkan
- Menggunakan proses dialektik: Pembuktian biasanya menggunakan proses dan argumen dialektik
- Obyeknya adalah institusi khususnya institusi negara

II. Pendekatan Modern (Tingkah Laku): thn 60 an dan 70 an (menjual ideologi yg bebas nilai - liberalisme).

¹ Disampaikan Pada Kuliah Pengantar Ilmu Politik Pertemuan Ke-1 (IK-1,3,4,5)

- Titik tolak pendekatan ini lebih kepada hukum “hubungan causalitas” antar kejadian (fenomena), seperti suatu fakta tentang sesuatu dibedakan dengan sistem nilai (mitos). Karena kalau dengan nilai di lapangan pandangan suatu komunitas tentang kekuasaan bisa berbeda-beda.
- Fungsi teori didalam pendekatan lebih untuk menjelaskan, yaitu mengandalkan proses positivistik = rasional = empirik → dan bisa dibuktikan.
- Pendekatan ini mengandalkan dan menggunakan konsep2 ilmu alam untuk menjelaskan dan membuat model. Seperti kajian sistem politik menggunakan "sistem" yg diambil dari ilmu biologi. Penggunaan Statistika dengan meminjam metodologi yang bersifat kuantitatif. Pendekatan ini mencoba mengilmiahkan studi politik, karena yg ilmiah adalah yg bisa diuji, bebas nilai (dimana si peneliti menjaga jarak dengan yg diteliti agar tidak bias).
- Obyeknya lebih kepada tingkah laku individu dan kelompok2 masyarakat, dan motif individu atau kelompok
- Fungsi kajian politik kepada bagaimana sesuatu dicapai. Dimana tujuan sudah bersifat "ideologis". Karena kalau kita menilai sesuatu yg bersifat "ideologis" kita dianggap tdk obyektif. Yang berkembang dalam pendekatan adalah teori2 tentang: sistem, struktural-fungsional dan pluralis liberal. Fokus diskusinya adalah bagaimana suatu struktur dalam suatu sistem, / institusi bekerja atau berlangsung yaitu bagaimana pembagian kerja.
- Dalam pendekatan in konsep negara tdk disinggung. Negara tidak banyak campur dan berfungsi sebagai fasilitator dimana konflik diselesaikan. Sehingga kehidupan politik diwarnai oleh kelompok (kelompok penekan dll).
- Mulai digugat pada tahun 70an:
 - karena mengabaikan tentang peran negara dimana pendekatan ini gagal menjelaskan sistem otoriter.
 - Dari kajian teori Dependencia: pendekatan tingkah laku lebih mengutamakan dominasi status quo. Lembaga2 capital global (IMF, WB, ADB). Teori trickle down effect: → ternyata yang akan dibagi dibawah lebih banyak yang menguap
 - Teori developmentalist → dijual sejak 50 an. Kalau lebih sejahtera maka akan ada demokrasi. Bangsa-bangsa di dunia dipilah dua; bangsa terbelakang dan bangsa maju. Analisis ini ternyata gagal di lapangan. Karena semakin maju ekonomi dan semakin tinggi pendidikan ternyata semakin tidak menjadi semakin demokratis.
 - Kajian di Indonesia berada di post modern. (sangat diwarnai modern). Akademisi Indonesia bersifat konsumen dari pada produsen teori.

III. Pendekatan Post Modern (Pasca Tingkah Laku):

1. Marxist :

- Neo Marxist: kehidupan ditentukan oleh ekonomi. Ekonomi adalah alat produksi dalam bentuk capital. Dalam pandangan ini penguasa politik adalah pemilik modal. Dalam teori ini liberalisme adalah memberikan ketergantungan kepada negara maju.

- Negara sebagai alat kapital untuk menindas suatu kelas oleh kelas buruh, petani, proletar. Dalam Bung Karno dengan rumusan Marhaenisme, si Marhaen masih punya modal dibandingkan proletar (misalnya petani memiliki modal dalam bentuk bentuk pacul).

2. Corporatisme:

- Menekankan kepada pembentukan kelompok-kelompok di masyarakat. Negara menciptakan sistem perwakilan kepentingan. Kelompok dibentuk untuk mewakili kelompok spesifik. Kelompok ini diklaim atas nama anggotanya untuk patuh (loyal) kepada negara. Sistem ini dikenal sebagai korporatisme negara.

3. Negara:

- Ilmu dipengaruhi oleh kekuasaan. Dunia ketiga adalah laboratorium. Pada saat ini Indonesia menjadi laboratorium masa transisi menuju demokratisasi, desentralisasi, penegakan HAM dll. Sebentar lagi akan banyak muncul hasil kajian transisi ini yang bias ideologis.
- Negara punya keinginan. Negara adalah otonom terhadap masyarakatnya (society). Untuk cita2 keadilan negara ikut campur (dlm menciptakan instrument untuk mendekatkan kesenjangan sosial dengan melakukan: subsidi, pajak subsidi silang, melindungi kepentingan publik. Sebagai contoh ada konsep yang berbeda antara Finlandia dan Indonesia. Untuk penerapan di Indonesia subsidi sangat dibenci oleh IMF.
- Perkembangan ilmu sangat ditentukan oleh perkembangan masyarakat. Dalam membendung komunisme. Akademisi Barat membuat Militer dibanyak negara ketiga sebagai agen pembangunan yang memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Selain itu ada alasan ideologis untuk mencari sekutu didalam menghadapi komunisme.
- WTO → Persaingan bebas vs ketimpangan struktur ekonomi global. Selatan-selatan selalu tertindas. Utara selalu menindas.

4. Dan lain-lain:

- Membahas kajian-kajian menyangkut: feminism, Gender, Environment, Rational Choice. Isitilah2 ini akan dilihat dalam konteks Studi Pembangunan yaitu penggunaan Pendekatan Kultural dalam Modernisasi. Dalam sosiologi adanya posmo sebagai pengganti dekonstruksi dalam ilmu politik sebagai pengganti pendekatan tradisional dan behaviour.
- Dalam ilmu sosial tdk bisa dikotak2 an. Teori tdk lebih sebagai alat sehingga sebagai ilmuawan dan praktisi pengguna teori tidak perlu fanatik.
- Demokrasi deliberatif → menggugat demokrasi liberal hari ini dimana demokrasi seolah-olah hanya menjadi urusan partai politik, pemilu, parlemen. Politik bisa dilaksanakan di-mana mana dan tidak hanya di partai politik. Contohnya di Brazil. Gugatan ini muncul sebagai bentuk

- kegagalan demokrasi yang disebut oleh Huntington sebagai Demokrasi Gelombang ke 3).
- Kisah sukses demokrasi bisa dicapai demokrasi substantial bila demokrasi terkonsolidasi. Banyak demokrasi yg gagal sehingga yang ada hanya demokrasi prosedural. Konsolidasi demokrasi penerapannya memerlukan untuk menciptakan habitus yang lain. Yang terjadi saat ini demokrasi deliberatif masih terbatas hanya melengkapi yang ada.
 - Ekonomi tumbuh dan diharapkan tercipta kelas menengah yang akan menegakan demokrasi. Ekonomi tidak maju tetapi tuntutan kebebasan semakin menguat. Demokrasi terjadi karena kemunculan elit. Negoisasi diantara elit akan memperpendek pencapaian demokrasi (contohnya sukses yang terjadi di Spanyol). Deklarasi Ciganjur di Indonesia dapat dianggap sebagai proses negoisasi tetapi yang terjadi adalah proses kegagalan elit memutuskan negoisasinya. Fakta dilapangan masih sangat diperdebatkan antara penerapan demokrasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi.sebagai contoh penerapan di India vs Negara Barat vs Singapura.